

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2015

**Puspita Sari Surya Prabawati
Eva Wany, SE., M.Ak.**

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of regional real revenue, general allocation fund and revenue sharing fund on capital expenditures, as well as the effect of regional real revenue, general allocation fund and revenue sharing fund with moderation of economic growth in capital expenditure. This research was conducted at the district/city in the province of East Java. The sampling technique used was purposive sampling, and there are 36 district/city in province of East Java into the sample. This research used the realization of budget reports and PDRB tables from 2013-2015 as the sample. The method of analysis used to test the hypothesis of Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that the effect of regional real revenue and general allocation fund has effect on capital expenditures, whereas revenue sharing fund have not an on capital expenditures. Moderating variables (economic growth) capable of moderating variable revenue sharing fund, but not able to moderate variable regional real revenue and general allocation fund on capital expenditure.

Keywords: *Capital Expenditure, Regional Real Revenue, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Economic Growth.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal serta pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil dengan moderasi pertumbuhan ekonomi pada Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling* jenuh, dan terdapat 36 kabupaten/kota Jawa Timur yang menjadi sampel penelitian ini. Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi APBD dan Tabel PDRB periode 2013-2015 sebagai sample. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh pada belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, namun variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh pada belanja modal. Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel Dana Bagi Hasil, namun tidak mampu memoderasi variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Menurut (Bastian, 2010) dengan kebijakan desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia saat ini, ruang fiskal daerah kini tersedia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kini sama-sama mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pelayanan publik yang sebelumnya terabaikan. Jika dana fiskal dikelola dengan hati-hati, ketertinggalan daerah-daerah tertentu dan perbatasan dapat dikurangi. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat (Bastian,

2010). Penyelenggara tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Bratakusumah dan Sholihin, 2004).

Dana yang merupakan potensi yang dimiliki masing-masing daerah adalah pendapatan asli daerah, dalam meningkatkan dana yang diperoleh untuk menjadi sumber pembelanjaan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan potensi daerah yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi pajak, hasil pengelolaan kekayaan bdaerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pengalokasian belanja modal menggunakan pendapatan asli daerah untuk peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur bagi daerah tersebut untuk meningkatkan pembangunan daerah. Jika sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat, Alokasi Belanja Modal juga akan meningkat. Penelitian studi yang dilakukan oleh Permata (2016) dan Permatasari (2015) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki setiap daerah dalam hal pendanaan kegiatan pemerintahannya dapat memicu terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Sebagai upaya menghadapi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk pendanaan kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi Umum dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur pemerintah menggunakan biaya modal. Pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk pemerintah daerah selain Dana Alokasi Umum yaitu Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian studi yang dilakukan oleh Permatasari (2015) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Heliyanto (2015) menyatakan bahwa DAU dan DBH berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, dan meminimalkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. PDRB menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Perekonomian di suatu wilayah dikatakan tumbuh dan berkembang jika barang dan jasa yang diproduksi pada periode ini lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, yang kemudian diturunkan menjadi nilai tambah (BPS,2015). Semakin banyak sarana dana prasarana publik serta infrastruktur dari belanja modal maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sudah semestinya mampu meningkatkan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana Bagi Hasil pada Alokasi belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Alokasi belanja modal. Penelitian studi yang dilakukan Jaya dan Dwirandra (2012) yang membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2012) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh

PAD pada Alokasi Belanja Modal. Penelitian studi yang dilakukan Sugiardi dan Supadmi (2012) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti kembali pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi belanja modal guna mengkonfirmasi hasil riset terdahulu.

LANDASAN TEORI

Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan perihal yang sama. Undang-undang ini mengatur otonomi yang didefinisikan sebagai otonomi seluas-luasnya yang menjadi urusan pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Daerah memilih peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, terdapat penengasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Erlina,dkk (2015) akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat.

Jenis Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dibedakan atas Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi sosial. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Akuntansi keuangan daerah ini diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik. Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional Erlina, dkk (2015).

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai PSAP No. 1 Paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Erlina dkk (2015).

Anggaran Daerah

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi (Yuwono, 2005). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No.17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran menurut Bastian (2010) sebagai berikut, anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja, anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang, anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan, anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja, anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi, anggaran merupakan instrumen politik, anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim dan Abdullah (2004) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan, dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun. Mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, menyatakan APBD berfungsi sebagai fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi.

Belanja Modal

Menurut PSAP No. 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran, pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Sedangkan, menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Erlina, dkk, 2015) yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal fisik lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Daerah yang mempunyai sarana dan prasara yang memadai dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut, sehingga akan menambah PAD. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah terdiri dari 2 (dua), yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis Pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, . Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah dikelompokkan dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD.

Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, PPh Pasal 21, Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan oleh APBN. Untuk daerah provinsi menerima sebesar 10% dari DAU yang ditetapkan, sedangkan kabupaten/kota sebesar 90%. Selanjutnya dari jumlah DAU 90% yang ditujukan untuk kabupaten dan kota,

maka setiap kabupaten dan kota akan mendapatkan DAU sesuai dengan hasil perhitungan “Formula DAU” yang ditetapkan berdasarkan Celah Fiskal dan Alokasi Dasar.

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku. Celah Fiskal (CF) merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010). Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto, 2007). Bahkan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan dan PDRB perkapita adalah hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (BPS,2008).

Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana yang didapatkan iuran langsung dari masyarakat seperti retribusi, pajak dan lain sebagainya. Pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana publik serta infrastruktur yang baik. Jika pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui biaya belanja modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Permata (2016) membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Permatasari (2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Begitu juga dengan hasil studi yang dilakukan Heliyanto (2015) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal

Sumber pendapatan yang penting yang didapatkan daerah selain PAD adalah Dana Perimbangan. Salah satunya adalah Dana Alokasi Umum, merupakan transfer dari APBN pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam membantu keuangan daerah dalam mengatur atau mengurus sendiri keuangannya untuk tujuan desentralisasi. Pemerintah daerah masih banyak yang membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dalam meningkatkan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Dana Alokasi Umum yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal ini memberikan indikasi yang kuat bahwa belanja modal akan dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum. Sehingga dapat disimpulkan jika

Dana Alokasi Umumnya tinggi maka Belanja Modal juga akan tinggi. Permatasari (2015) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Firnandi Heliyanto (2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dana Bagi Hasil juga merupakan penunjang pemerintah daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah menggunakan belanja modal. Hal ini dapat disimpulkan jika belanja modal naik maka Dana Bagi Hasil juga naik. Wandira (2012) yang membuktikan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Firnandi Heliyanto (2015) menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

H₃ : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu daerah berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah. Jika pembangunan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga mempengaruhi alokasi belanja modal karena sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah dibelanjakan menggunakan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya PAD terhadap Belanja Modal. Jaya dan Dwirandra (2012) yang membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2012) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi atau berpengaruh hubungan antara Pendapatan Asli Daerah pada alokasi belanja modal.

H₄ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal

Pemerintah daerah masih banyak yang membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik dalam meningkatkan pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik bagi suatu daerah berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya DAU terhadap Belanja Modal. Sugiardi dan Supadmi (2012) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi atau berpengaruh hubungan antara Dana Alokasi Umum pada Alokasi Belanja Modal.

H₅ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal. Dana Bagi Hasil merupakan penunjang daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik yaitu bisa dikategorikan meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Jadi dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi atau berpengaruh hubungan antara Dana Alokasi Umum pada Alokasi Belanja Modal.

H₆ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota untuk tahun 2013-2015 dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan sampel yang diambil dari populasi diharapkan betul-betul representatif atau mewakili populasi (Sugiyono, 2015). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *sampling* jenuh atau sensus. Berdasarkan metode *sampling* jenuh atau sensus, diperoleh sampel sebanyak 29 Kabupaten dan 8 Kota dari 38 Kabupaten/Kota anggota populasi dan jumlah observasi sebanyak 108 yang diperoleh dari 36 Kabupaten/Kota dikali 3 tahun periode 2013 – 2015.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2015.

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai Indikator variabel pendapatan asli daerah diukur dengan:

Pendapatan Asli Daerah = Pendapatan Pajak Daerah + Pendapatan Retribusi Daerah +
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2015.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dana Bagi Hasil untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2015.

Variabel *Moderating* Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}}{\text{PDRBt-1}}$$

Keterangan :

PDRBt = Pendapatan Domestik Regional Bruto periode t.

PDRBt-1 = Pendapatan Domestik Regional Bruto periode tahun sebelumnya t-1.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif. Sumber Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro,2003). Data tersebut bersumber dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2013-2015 seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diperoleh dari *website* Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai pengukur Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2015 seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) melalui *website*.

Teknik Analisis

Dalam menguji hipotesis yang diajukan, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dan regresi interaksi. Dalam persamaan regresi melalui regresi interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regresion Analysis* (MRA) sebagai berikut (Ghozali, 2006) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4(X_1 \times X_4) + b_5(X_2 \times X_4) + b_6(X_3 \times X_4) + e$$

Keterangan :

Y = Alokasi Belanja Modal

a = Konstanta

b₁₋₆ = Koefisien Regresi

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Dana Bagi Hasil

X₃ = Dana Alokasi Umum

- X₄ = Pertumbuhan Ekonomi
- X₁xX₄ = Interaksi Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
- X₂xX₄ = Interaksi Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi
- X₃xX₄ = Interaksi Dana Bagi Hasil dan Pertumbuhan Ekonomi
- e = *Error Estimate*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis

Uji F

Tabel 1
Hasil Perhitungan Uji F

F	Sig.
141,009	0,000

Sumber : Data diolah

Hasil uji F menunjukkan bahwa seluruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂), Dana Bagi Hasil (X₃), Pertumbuhan Ekonomi (X₄), PADxPertumbuhan Ekonomi (X₁xX₄), DAUxPertumbuhan Ekonomi (X₂xX₄), DBHxPertumbuhan Ekonomi (X₃xX₄) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal (Y). Hal ini tampak pada uji F sebesar 141,009 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05.

Analisis Regresi Moderat

Tabel 2
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-188896732,627	180107646,152		-1,049	,297
PAD	,440	,112	,977	3,939	,000
DAU	,614	,228	,665	2,690	,008
DBH	-,073	,112	-,037	-,655	,514
1 Pertumbuhan Ekonomi	3211060072,550	3432168790,886	,238	,936	,352
PADxPE	-1,297	1,889	-,176	-,687	,494
DAUxPE	-6,859	4,355	-,585	-1,575	,118
DBHxPE	4,271	1,132	,274	3,774	,000

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Modal

Sumber : Data diolah

Dari data Tabel 7 di atas persamaan regresi yang didapat adalah:

$$Y = - 188896732,627 + 0,440 X_1 + 0,614 X_2 - 0,073 X_3 + 3211060072,550 X_4 - 1,297 (X_1xX_4) - 6,859 (X_2xX_4) + 4,271 (X_3xX_4) + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Nilai konstanta (a) sebesar – 188.896.732,627 menunjukkan bahwa Alokasi Belanja Modal (Y) akan mengalami penurunan sebesar – 188.896.732,627, jika Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂), Dana Bagi Hasil (X₃), Pertumbuhan Ekonomi (X₄), PADxPertumbuhan Ekonomi (X₁xX₄), DAUxPertumbuhan Ekonomi (X₂xX₄), DBHxPertumbuhan Ekonomi (X₃xX₄) bernilai konstan atau sama dengan nol. 2) Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah (b₁) sebesar 0,440 menunjukkan bahwa jika variabel Pendapatan Asli Daerah (X₁) naik satu

satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan Alokasi Belanja Modal sebesar 0,440 dan diasumsikan untuk variabel Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Bagi Hasil (X_3), Pertumbuhan Ekonomi (X_4), PADxPertumbuhan Ekonomi ($X_1 \times X_4$), DAUxPertumbuhan Ekonomi ($X_2 \times X_4$), DBHxPertumbuhan Ekonomi ($X_3 \times X_4$) bernilai konstan atau sama dengan nol. 3) Nilai koefisien Dana Alokasi Umum (b_2) sebesar 0,614 menunjukkan bahwa jika variabel Dana Alokasi Umum (X_2) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan Alokasi Belanja Modal sebesar 0,614 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_3), Pertumbuhan Ekonomi (X_4), PADxPertumbuhan Ekonomi ($X_1 \times X_4$), DAUxPertumbuhan Ekonomi ($X_2 \times X_4$), DBHxPertumbuhan Ekonomi ($X_3 \times X_4$) bernilai konstan atau sama dengan nol. 4) Nilai koefisien Dana Bagi Hasil (b_3) sebesar - 0,073 menunjukkan bahwa jika variabel Dana Bagi Hasil (X_3) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan Alokasi Belanja Modal sebesar - 0,073 dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Pertumbuhan Ekonomi (X_4), PADxPertumbuhan Ekonomi ($X_1 \times X_4$), DAUxPertumbuhan Ekonomi ($X_2 \times X_4$), DBHxPertumbuhan Ekonomi ($X_3 \times X_4$) bernilai konstan atau sama dengan nol. 5) Nilai koefisien PADxPertumbuhan Ekonomi ($X_1 \times X_4$) (b_5) sebesar -1,297 menunjukkan bahwa jika variabel (PADxPertumbuhan Ekonomi) (X_5) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Alokasi Belanja Modal sebesar -1,297 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Bagi Hasil (X_3), Pertumbuhan Ekonomi (X_4), DAUxPertumbuhan Ekonomi ($X_2 \times X_4$), DBHxPertumbuhan Ekonomi ($X_3 \times X_4$) bernilai konstan atau sama dengan nol. 6) Nilai koefisien DAUxPertumbuhan Ekonomi ($X_2 \times X_4$), (b_6) sebesar - 6,859 menunjukkan bahwa jika variabel (DAUxPertumbuhan Ekonomi) (X_5) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan penurunan pengaruh Dana Alokasi Umum pada Alokasi Belanja Modal sebesar - 6,859 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Bagi Hasil (X_3), Pertumbuhan Ekonomi (X_4), PADxPertumbuhan Ekonomi ($X_1 \times X_4$), DBHxPertumbuhan Ekonomi ($X_3 \times X_4$) bernilai konstan atau sama dengan nol. 7) Nilai koefisien DBHxPertumbuhan Ekonomi ($X_3 \times X_4$) (b_7) sebesar 4,271 menunjukkan bahwa jika variabel (DBHxPertumbuhan Ekonomi) (X_5) naik satu satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan pengaruh Dana Bagi Hasil pada Alokasi Belanja Modal sebesar 4,271 dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Bagi Hasil (X_3), Pertumbuhan Ekonomi (X_4), PADxPertumbuhan Ekonomi ($X_1 \times X_4$), DAUxPertumbuhan Ekonomi ($X_2 \times X_4$) bernilai konstan atau sama dengan nol.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui dari uji t sebesar 3,939 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur bergantung kepada Pendapatan Asli Daerah untuk membelanjakan modal yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan tujuan menunjang sarana dan prasarana publik yang baik serta infrastruktur yang meningkatkan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dalam meningkatkan dana yang diperoleh untuk menjadi sumber pembelanjaan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan potensi daerah yang dimiliki. Jika pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik dapat ditingkatkan maka Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh juga semakin meningkat. Karena peningkatan sarana dan prasarana dibelanjakan melalui belanja modal.

Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi juga alokasi belanja modal yang diperoleh. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Zhara Saski Widoasri Permata (2016) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Isti Permatasari (2015) menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar 2,690 dengan nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan Dana Alokasi Umum yang diperoleh transfer dari APBN pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk tujuan membantu keuangan daerah demi pelaksanaan desentralisasi, digunakan pemerintah daerah untuk membelanjakan modalnya. Dalam mengalokasikan belanja modal tidak terlepas dari Dana Alokasi Umum karena tujuan dari Dana Alokasi Umum yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah masih banyak yang membutuhkan dana bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh semakin besar pengalokasian belanja modalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Isti Permatasari (2015) yang membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Firnandi Heliyanto (2015) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar -0,655 dengan nilai signifikan 0,514 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil yang bersumber pajak dan kekayaan daerah dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tidak berpengaruh pada Alokasi Belanja Modal. Dana Bagi Hasil yang merupakan dana yang berasal dari APBN transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tidak digunakan pemerintah daerah untuk membelanjakan modalnya. Sehingga pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tidak menggantungkan belanja modalnya menggunakan DBH dapat dikatakan daerah sudah mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan Arbie Gugus Wandira (2012) yang membuktikan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Firnandi Heliyanto (2015) menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating tidak mampu dalam memoderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar -0,687 dengan nilai signifikan 0,494 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating tidak mampu dalam memoderasi Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi

Belanja Modal. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah, sehingga pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjadi faktor penentu terjadinya pengaruhnya PAD terhadap alokasi belanja Modal. Hal ini karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum maksimal walaupun meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas sudah tercapai. Kurang tepat sarannya program pemerintah karena tidak ditunjang adanya aspek sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengakibatkan tujuan pertumbuhan ekonomi masih belum tercapai. Program pemerintah daerah yang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga tujuan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur akan tercapai. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya dan A.A.N.B. Dwirandra (2012) yang membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal. Demikian pula dengan hasil studi yang dilakukan oleh Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiardi dan Ni Luh Supadmi (2012) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating tidak mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar -1,575 dengan nilai signifikan 0,118 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating tidak mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal. Hal ini disebabkan fungsi Dana Alokasi Umum sebagai *equalization grant* yaitu untuk menetralkan ketimpangan kemampuan keuangan yang diperoleh daerah menyebabkan kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu daerah Kabupaten/Kota yang menggantungkan keuangan daerahnya dengan Dana Alokasi Umum ini. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan Ni Putu Dwi Eka Rini Sugiardi dan Ni Luh Supadmi (2012) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan mampu memoderasi pengaruh DAU pada Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diketahui uji t sebesar 3,774 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating mampu dalam memoderasi Hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Alokasi Belanja Modal. Proses Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal. Tetapi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tidak mengalokasikan belanja modal dari Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil ini digunakan untuk membiayai pembelanjaan daerah lainnya selain belanja modal. Hal ini disebabkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari potensi-potensi sumber daya alam dan pajak yang diperoleh daerah untuk membiayai biaya selain belanja modal memiliki tujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi karena dalam memenuhi pertumbuhan ekonomi tidak harus

meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur. Melalui pembelanjaan daerah selain belanja modal, pertumbuhan ekonomi akan berjalan efektif dan efisien ketika berpijak pada perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai uji F sebesar 141,009 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa naik dan turunnya Alokasi Belanja Modal yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh naik dan turunnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota dan dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian ini secara bersama-sama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil mampu memberikan gambaran yang cukup bahwa pemerintah daerah mampu bertanggung jawab sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah dalam hal mengelola sumber keuangan yang diperoleh untuk tujuan meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Beberapa kesimpulan tersebut terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 2) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 3) Dana Bagi Hasil berpengaruh dan mampu dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh dan tidak mampu dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. 5) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. Saran bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk pengalokasian belanja modal untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dimana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PAD, DAU dan DBH memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap alokasi belanja modal.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Edisi ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono. 2010. *Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai Ekonomi, Edisi Ketiga*. Jakarta: Keputakaan Populer Gramedia.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2008. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2006-2008*. Bandung: Badan Pusat Statistik Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Penggunaan Tahun 2009-2013*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Sholihin Dadang. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanuddin, Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____, I. Dan Ratmono, D.. 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. *Jurnal Ekonomi STEI* No. 2/Th. XIII/25.
- Heliyanto, Firnandi. 2015. *Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Pada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur*. *Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi*. Skripsi. Surabaya: STIESIA Surabaya.
<https://www.bps.go.id>. *Badan Pusat Statistik*.
<https://www.djpk.depkeu.go.id>. *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika dan A.A.N.B. Dwirandra. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi*. *Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi*. Skripsi. Bali: Universitas Udayana Bali.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mayasari, Luh Putu Rani. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng*. *Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi*. Skripsi. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha Bali.
- Nordiawan, Deddy dan Ayuningtyas Hertianti. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____, D. I. S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

- _____, Deddy dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuarisa, Sheila Ardhan. 2012. *Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nugroho, Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistic Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 14, 41,101,102.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 3 tentang Laporan Arus Kas Paragraf 2.
- Pelealu, Andreas Marzel. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012*. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Skripsi. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Paragraf 61,62,63,64,65,78,79,80,81,83.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah,
- Permata, Zhara Saski Widodoasri. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan (DP) Terhadap Belanja Modal Studi Pada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur*. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Skripsi. Surabaya: STIESIA Surabaya.
- Permatasari, Isti. 2015. *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur*. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Skripsi. Surabaya: STIESIA Surabaya.
- Putro, Nugroho Suratmo dan Sugeng Pamudji. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang..
- Santoso, Singgih. 2010. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desebtralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siregar, B. dan B.Siregar. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
- Sularno, Fitria Megawati. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Studi Kasus Pada Kab/Kota Di Provinsi Jawa Barat*. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama Bandung.
- Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Ni Luh Supadmi. 2012. *Pengaruh PAD, DAU, DAN SILPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Skripsi. Bali: Universitas Udayana Bali.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Yovita, Farah Marta. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia Periode 2008-2010*. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Yuwono, S., T.A. Indrajaya., Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wandira, Arbie Gugus. 2012. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri.